

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Adolf, H. (1991). *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Cameron, J., Werksman, J., & Roderick, P. (1996). *Improving Compliance with International Environmental Law*. Earthscan.
- Creswell, J. (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.
- Diantha, I. M. (2017). *Buku Ajar Hukum Internasional*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Harsono, B. (2003). *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Kusumaatmaja, M., & Agoes, E. R. (2003). *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: P.T Alumni.
- Navia, R. N. (2003). *International Peremptory Norms (JusCogens) and International Humanitarian Law*. London: Kluwer Law International.
- Novera, A., & Utama, M. (2014). *Dasar-Dasar Hukum dan Kontrak Arbitrase*. Malang: Tunggal Mandiri.
- Starke, J. G. (2004). *Pengantar Hukum Internasional 2*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sumber Jurnal

- Abdurahman, A. (2019). Konsistensi UUPA Terkait Hak Milik Atas Tanah Bagi WNI Non Pribumi di Yogyakarta. *Notarius, Volume 12 Nomor 1*, 500-511.

- Agusman, D. D. (2008). Status Hukum Perjanjian Internasional dalam Hukum Nasional RI (Tinjauan Dari Perspektif Praktik Indonesia). *Jurnal Hukum Internasional*, Volume 5 Nomor 3, 488-504.
- Aprianto, A. (2022). Relevansi Monisme dan Dualisme Bagi Pemberlakuan Perjanjian Internasional di indonesia. *Jurnal Konstitusi* Volume 19, Nomor 3, 580-605.
- Barokah, N. S. (2018). Antara Ketidakpatuhan dan Sejarah Masa Lalu: Analisis Kepatuhan Negara Indonesia terhadap Konvensi ICERD, Studi Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta dan Papua. *Journal of International Relations*, Volume 4, Nomor 3, 447-455.
- Berry, S. E. (2011). Bringing Muslim Minorities within the International Convention on the elimination of All Form of Racial Discrimination - Square Peg in a Round Hole? *Human Rights Law Review* 11:3, 423-450.
- Firdaus. (2014). Kedudukan Hukum Internasional Dalam Sistem Perundang-Undangan Nasional Indonesia. *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 8 No. 1, 36-52.
- Harianto, A. P. (2017). Ketentuan Pemberian Hak Atas Tanah Kepada Seorang WNI Non Pribumi di Daerah Istimewa Yogyakarta Ditinjau dari Asas Persamaan Hak Menurut Ketentuan UUPA. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta*.
- Johns, L. (1995). Racial Vilification and ICERD in Australia. *eLaw Journal: Murdoch University Electronic Journal of Law*, Volume 2, Number 1.
- Krismantoro, D. (2022). Sejarah dan Perkembangan Hukum Agraria di Indonesia Dalam Memberikan Keadilan Bagi Masyarakat. *International Journal Demos* Volume , Issue 2, 880-889.
- Kurnia, M. P. (2008). Hukum Internasional (Kajian Ontologis). *Risalah Hukum Fakultas Hukum Fakultas Unmul Vol. 4, No. 2*, 77-85.

- Lestarini, R. (2018). Kebijakan Pertanahan Bagi WNI Keturunan Tionghoa di Yogyakarta: Diskriminasi atau Diskriminasi Positif. *Jurnal Hukum & Pembangunan* ke- 48 No. 1, 44-63.
- Limuris, F. C. (2022). Affirmative Policy Sebagai Bentuk Diskriminasi Positif Dalam Perolehan Hak Milik Atas Tanah Bagi Warga Indonesia Keturunan Tionghoa Nonpribumi Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Volume 1 Dharmasiswa*, 1771-178.
- Razali, N. b. (2019). Justification for Malaysia Towards Accession of International Convention Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD). *Research Gate Publication*, 1-16.
- Reki, N. D. (2018). Pembatasan Pemilikan dan Penguasaan Hak Atas Tanah Dalam Perspektif Reforma Agraria. *Jurnal Hukum Magnum Opus Volume 1, Nomor 1*, 36-42.
- Situngkir, D. A. (2018). Terikatnya Negara Dalam Perjanjian Internasional. *Refleksi Hukum Vol. 2, No 2*, 167-180.
- Sugiyah, N. (2019). Pemilikan Hak Atas Tanah Bagi Warga Keturunan Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Binamulia Hukum Vol. 8, No 1*, 39-49.
- Tenripadang, A. (2016). Hubungan Hukum Internasional dengan Hukum Nasional. *Jurnal Hukum Diktum Volume 14, Nomor 1*, 67-75.
- Tuah, F., Anwar, A., & Waas, R. M. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Keturunan Asia Dari Tindakan Diskriminasi Rasial Di Masa Pandemi Covid 19. *Jurnal Ilmu Hukum TATOHI Volume 2, Nomor 6*, 558-570.

Sumber Internet

- Amali, Z. (2019, November 23). *Duduk Perkara Gugatan Larangan WNI Keturunan Punya Tanah di Jogja*. Diambil kembali dari tirto.id:

<https://tirto.id/duduk-perkara-gugatan-larangan-wni-keturunan-punya-tanah-di-jogja-el9k>

CNN Indonesia. (2019, November 20). *Keistimewaan Yogyakarta Agar WNI Tionghoa Bisa Punya Tanah*. Diambil kembali dari CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191120120256-12-449935/keistimewaan-yogyakarta-agar-wni-tionghoa-bisa-punya-tanah>

Dougall, G. M. (2021, Februari). *Audio Visual Library of International Law*. Diambil kembali dari lega.un: <https://legal.un.org/avl/ha/cerd/cerd.html>

Kami, I. M. (2018, Desember 10). *Indonesia Sudah Lama Ratifikasi ICERD yang Picu Aksi 812 di Malaysia*. Diambil kembali dari detikNews: <https://news.detik.com/berita/d-4337071/indonesia-sudah-lama-ratifikasi-icerd-yang-picu-aksi-812-di-malaysia>

United Nations. (1966). International Convention on The Elimination of All Form of Racial Discrimination. *United Nations* (hal. 5). United Nations. Diambil kembali dari United Nations: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-2&chapter=4&clang=_en

United Nations. (1969). Vienna Convention on the Law of Treaties. Vienna. Diambil kembali dari United Nations: https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1_1_1969.pdf